

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1. Kesimpulan

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perdagangan bebas merupakan konsep perdagangan dengan meniadakan berbagai hambatan buatan (hambatan yang dibuat oleh pemerintah) pada perdagangan antar individual ataupun perusahaan-perusahaan pada negara yang berbeda. Perdagangan bebas sebenarnya telah melalui serangkaian sejarah yang panjang. Pada awalnya perdagangan bebas muncul di Inggris pada abad ke XV.

Seiring dengan berkembangnya waktu, agenda pasar bebas menjadi konsep perdagangan yang dianggap oleh masyarakat internasional paling ideal oleh aktor-aktor internasional. Inilah yang menyebabkan perdagangan bebas mampu berkembang pesat dan lambat laun, ketentuan ini akan mengikat seluruh negara dunia. Salah satunya adalah ASEAN yang memiliki peranan penting dalam dinamika perdagangan internasional.

Salah satu mitra ASEAN yang memiliki peranan penting dalam perdagangan regional adalah Cina. Kedua belah pihak pada tahun 2002 kemudian berhasil menerapkan konsep perdagangan bipartit yang disebut dengan CAFTA, yaitu sebuah ketentuan yang merupakan kerangka kerjasama perdagangan bebas

antara negara-negara ASEAN dan Cina. Kerjasama ini ditandatangani di Phnom Pehn, Kamboja pada 4 November 2002. Bagi Cina, CAFTA memiliki peranan penting untuk mendukung kemajuan perekonomiannya yang ditopang oleh pilar industri dan investasi asingnya. Sedangkan bagi negara-negara ASEAN, keberadaan Cina memiliki arti penting yaitu sebagai media dalam perluasan kerjasama *Government to Government* (G to G), potensi negara investor dan substitusi ketergantungan bentuk-bentuk perekonomian negara-negara ASEAN terhadap Barat

Keberadaan hegemoni perekonomian dan perdagangan Cina yang begitu besar kemudian dihadapkan pada perdagangan Indonesia, khususnya pada komoditas tekstil. Sejak lama Cina telah memposisikan diri sebagai produsen tekstil dengan harga yang sangat murah dengan kapasitas produksi yang besar, hal ini tentunya berdampak sangat serius bagi perdagangan tekstil di Indonesia.

Dinamika ekspor tekstil Indonesia ke Cina dari tahun 2005 hingga 2007 cenderung menunjukkan tren peningkatan, namun menjelang tahun 2008 ke 2009 nilai ekspor cenderung fluktuatif dan akhirnya sampai dengan tahun 2011 mengalami tren penurunan. Sedangkan impor tekstil Indonesia dari Cina setiap tahunnya selalu mengalami tren kenaikan yang signifikan. Hal ini sudah menjadi bukti nyata bahwa pemberlakuan CAFTA memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perdagangan tekstil Indonesia.

Demi menangani dominasi perdagangan tekstil Cina, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan para pemangku kepentingan lainnya mulai

memikirkan langkah untuk dapat menyelamatkan industri tekstil dalam negeri dengan menempuh berbagai kebijakan. Beberapa kebijakan yang ditempuh, yaitu : *pertama*, kebijakan domestik berupa dukungan terhadap sektor UMKM tekstil karena pada prinsipnya sektor inilah yang paling terkena dampak dari penerapan CAFTA karena keterbatasan faktor teknis, sumber daya manusia yang berkualitas, bahan baku dan keuangan. Oleh sebab itu pemerintah melalui kementerian perdagangan dan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah merumuskan tiga butir kebijakan yaitu :

- a. Kebijakan pertama, adalah peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UMKM, khususnya pada produk tekstil dan batik yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, *multifinance*, asuransi.
- b. Kebijakan kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan *entrepreneurship* bagi pelaku UMKM di Indonesia.
- c. Kebijakan ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan dan kewirausahaan secara menyeluruh.

Kemudian kebijakan yang *Kedua* adalah kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia melalui promosi dagang. Secara prinsip produk-produk tekstil Indonesia, termasuk batik memiliki karakter yang khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Namun ketidaksiapan para pengusaha tekstil Indonesia untuk bersaing dengan para pengusaha Cina menjadi kendala yang cukup besar bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai promosi dagang ke Cina.

Kebijakan yang *Ketiga* adalah melalui perizinan dan kepabeanan. Kebijakan ini mampu memberikan pengaruh yang positif yang memproteksi perdagangan luar negeri Indonesia tanpa menghambat konsep perdagangan bebas.

IV.2. Saran

Melalui penelitian ini dapat ditarik sebuah temuan akademik (*learning point*) yang juga berguna sebagai saran pada penelitian-penelitian selanjutnya bahwa kasus perdagangan bebas regional seperti halnya CAFTA ternyata tidak hanya terjadi dalam konteks negara-negara ASEAN dengan wilayah (negara-negara) luar, namun juga terjadi di wilayah lain. Untuk itu, penulis dapat memberikan saran bahwa perbandingan kebijakan dalam menangani pasar bebas regional menjadi hal yang sangat menarik.

Dengan perbandingan kebijakan antar wilayah mengenai perdagangan bebas maka diharapkan akan ditemukan sebuah nilai penting yang dapat diterapkan di Indonesia. Selain itu, perbandingan konsep perdagangan bebas antar

wilayah diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak selanjutnya yang membutuhkan.

